

E-BOOK MATERI TES AKADEMIK

WAWASAN
KEBANGSAAN



WAWASAN KEBANGSAAN

A. NASIONALISME

a. Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan itu masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri.

b. Ciri-Ciri Nasionalisme

1. Sudah ada persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Sifat perjuangan bersifat nasional.
3. Tujuannya untuk mencapai kemerdekaan yang nantinya ingin mendirikan suatu negara merdeka yang kekuasaannya ditangani rakyat.
4. Sudah ada organisasi modern dan bersifat nasional.
5. Mengandalkan kekuatan otak (pikiran), dimana pendidikan sangat berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. (Drs. Sudiyo, 2002: 4)

Semangat kebangsaan (nasionalisme) ditampung dalam Pancasila sila ke-3, yakni "*Persatuan Indonesia*" yang mempunyai ciri-ciri:

1. Mencintai bangsa dan tanah air Indonesia.
2. Rela berkorban demi bangsa dan negara.
3. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia.
4. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Semangat nasionalisme ditandai dengan sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928, di mana sebelumnya perjuangan yang dilakukan untuk melawan penjajahan masih bersifat kedaerahan. Isi sumpah pemuda adalah sebagai berikut:

1. Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia.
2. Kami poetra dan poetri Indonesia, mengaku berbangsa satoe, bangsa Indonesia.
3. Kami poetra dan poetri Indonesia, menjoenjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

c. Paham yang Bertentangan dengan Nasionalisme

1. *Chauvinisme*

Merupakan bentuk dari perasaan cinta, bangga, royalitas yang tinggi, fanatisme atau kesetiaan pada tanah air (negara) tanpa mempertimbangkan pandangan dari orang lain satu bangsa lain . Chauvinisme merupakan ajaran dan paham tentang fanatisme seseorang terhadap tanah air yang berlebihan sehingga merendahkan kualitas negara lain atau menganggap bangsa lain sebagai bangsa yang tidak bagus. Beberapa negara yang pernah menerapkan semangat Chauvinisme adalah Jerman, Jepang, dan Italia.

2. *Etnosentrisme*

Merupakan suatu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dari budaya lainnya atau membanggakan budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya lain. Hal ini akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa.

d. Tujuan Nasionalisme

Pada dasarnya nasionalisme yang muncul di berbagai negara mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
2. Menghilangkan *Ekstremisme* (tuntutan berlebihan) dari warga negara (individu dan kelompok).
3. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.
4. Menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, dan mempererat tali persaudaraan yang utuh.

e. Contoh Sikap Nasionalisme

Contoh perilaku atau sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari:

1. Menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku.
2. Mematuhi dan mentaati hukum negara.
3. Bersedia mempertahankan dan memajukan negara.
4. Melestarikan budaya Indonesia.
5. Menggunakan produk dalam negeri.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

B. BELA NEGARA

a. Pengertian Bela Negara

Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.

Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa serta dalam upayanya mencari penghidupan.

Bela negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fisik dan fisik.

1. Bela negara secara fisik
2. Bela negara secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut
3. Bela negara secara non-fisik
4. konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer).

Di Indonesia, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa tersebut, merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri demikian luas, mulai dari pemahaman yang halus hingga keras.

b. Unsur Dasar Bela Negara

Di dalam proses pembelaan negara, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, di antaranya adalah:

1. Cinta tanah air kesadaran berbangsa dan bernegara
2. Yakin akan pancasila sebagai ideologi negara
3. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
4. Memiliki kemampuan awal bela negara

c. Dasar Hukum Bela Negara

Beberapa dasar hukum bela negara adalah:

1. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
5. Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini digubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu *Dharma Oratmangun*.

Selain itu, dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai hari Bela Negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006.

d. Fungsi dan Tujuan Bela Negara

1. *Fungsi bela negara*
 - a) Mempertahankan negara dari berbagai ancaman
 - b) Menjaga keutuhan wilayah negara
 - c) Merupakan kewajiban setiap warga negara
 - d) Merupakan panggilan sejarah
2. *Tujuan bela negara*
 - a) Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
 - b) Melestarikan budayaMenjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945
 - c) Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara
 - d) Menjaga identitas dan integritas bangsa/negara

e. Manfaat Bela Negara

Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara:

1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain.
2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan.
3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh.
4. Menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan kemampuan diri
5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok.

6. Membentuk Iman dan Taqwa pada Agama yang dianut oleh individu.
7. Berbakti pada orang tua, bangsa, agama.
8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.
9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin.
10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.

f. Contoh Bela Negara

Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan:

1. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga (lingkungan keluarga)
2. Membentuk keluarga yang sadar hukum (lingkungan keluarga)
3. Meningkatkan iman dan takwa dan iptek (lingkungan sekolah)
4. Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah (lingkungan sekolah)
5. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat (lingkungan masyarakat)
6. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama (lingkungan masyarakat)
7. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku (lingkungan negara)
8. Membayar pajak tepat pada waktunya (lingkungan negara)

C. INTEGRITAS

a. Pengertian Integritas

Integritas yaitu konsistensi atau keteguhan yang tidak bisa tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai keyakinan dan prinsip. Pengertian lain dari integritas adalah konsep yang menunjukkan konsistensi atau keteguhan perbuatan dengan nilai-nilai dan prinsip. Pada etika integritas bisa diartikan sebagai kebenaran dan kejujuran perbuatan yang dilakukan seseorang.

Istilah integritas jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang orang masih awam atau tidak memahami arti kata ini, untuk itu istilah integritas memang berhubungan dengan sikap seseorang, sifat yang melekat pada pribadi seseorang.

b. Pengertian Integritas Menurut Para Ahli

Di bawah ini adalah pengertian integritas menurut para ahli berdasarkan hasil riset dan pengalamannya.

1. *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*

Pengertian integritas menurut KBBI adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

2. *Andreas Harefa*

Pengertian integritas menurut Andreas Harefa adalah tiga kunci yang bisa diamati,

yaitu menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen dan mengajarkan sesuatu dengan konsisten.

3. *Ippho Santosa*

Pengertian integritas menurut Ippho Santosa adalah sebagai menyatunya pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk melahirkan reputasi dan kepercayaan.

4. *Henry Cloud*

Pengertian integritas menurut Henry Cloud adalah ketika berbicara tentang integritas maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang berlainan, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia.

c. Fungsi Integritas

Fungsi dari integritas antara lain yaitu:

1. *Fungsi kognitif dari integritas*

Yang mencakup kecerdasan moral dan *self insight*. Sedangkan *self insight* itu sendiri mencakup *self knowledge* dan *self reflection*. Artinya, integritas fungsinya memelihara moral dan akhlak seseorang yang selanjutnya mendorong dia untuk mempunyai pengetahuan yang luas.

2. *Fungsi afektif pada integritas*

Yang mencakup *conscience* dan *self regard*. Dalam konteks ini integritas fungsinya memelihara nurani seseorang supaya tetap hanif sebagai seorang hamba agar jelas perbedaan di antara dirinya dengan hewan. Sebab secara biologis manusia dan hewan, sama-sama memiliki *hepar* "hati", tetapi hewan tidak mempunyai *qalb*, sesuatu yang ada di diri setiap manusia.

d. Tujuan Integritas

Tujuan dari integritas adalah sebagai berikut:

1. Integritas adalah salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan
2. Integritas menjadikan manusia bisa memimpin dan dipimpin
3. Integritas membuat lahirnya kepercayaan
4. Integritas bisa melahirkan prestasi

e. Manfaat Integritas

1. *Manfaat secara fisik*

Diri kita akan merasa fit, sehat, dan bugar. Kita setiap saat merasa siap melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari.

2. *Manfaat secara intelektual*

Dengan mental dan pengetahuan kita bisa memaksimalkan kemampuan otak.

3. *Manfaat secara emosional*
Diri menjadi lebih penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati, solidaritas tinggi, dan penuh kehangatan emosional dalam interaksi kerja
4. *Manfaat secara spiritual*
Membuat diri seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menilai segala sesuatu termasuk pengalaman-pengalaman hidup, baik yang menyenangkan atau yang tidak membuat senang seperti keberhasilan, kegagalan, dan penderitaan.
5. *Manfaat secara sosial*
Kita akan mampu membuat berkembang suatu hubungan baik satu sama lainnya dalam lingkungan masyarakat, bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang menuntut kekompakan dan kerja sama yang baik, mempunyai kepekaan hati dan perasaan untuk selalu memberi tempat untuk orang lain di dalam hati kita.

f. Ciri-Ciri Pribadi yang Memiliki Integritas

Ciri-ciri seseorang yang memiliki integritas adalah sebagai berikut:

1. Apabila berjanji selalu menepati
2. Tidak plin-plan dan taat asa
3. Memiliki komitmen yang teguh dan bertanggung jawab
4. Satu kata satu perbuatan
5. Jujur dan terbuka
6. Menghargai waktu
7. Menjaga prinsip dan nilai-nilai yang telah diyakini

D. PILAR NEGARA

a. Sistem Tata Negara Indonesia

1. *Hakikat Demokrasi*

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan rakyat memiliki proporsi yang sangat penting serta melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara.

Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di negara-negara kota (*city state/ polis*) di Yunani Kuno. Saat itu, demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung. Munculnya Magna Charta (1215) di Inggris, sebagai awal kebangkitan kembali demokrasi setelah sekian lama dilupakan. Beberapa tokoh pendukung berkembangnya demokrasi sebagai berikut.

- a) John Locke dari Inggris (1632–1704) yang memberikan tiga rumusan hak-hak dasar manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan (*life, liberty, and property*).

- b) Montesquieu dari Perancis (1689–1755) yang memberikan konsep “Trias Politika,” yaitu suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang antarlembaga negara.

Beberapa prinsip, jenis, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagai berikut.

a) Prinsip-prinsip demokrasi

- 1) Pemerintahan berdasarkan konstitusi.
- 2) Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.
- 3) Terjaminnya hak asasi manusia.
- 4) Persamaan kedudukan di hadapan hukum.
- 5) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- 6) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik (*public policy*).
- 7) Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat.
- 8) Kebebasan pers atau media massa.

b) Macam-macam demokrasi

Ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:

- 1) Demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah kenegaraan.
- 2) Demokrasi perwakilan atau demokrasi modern, yaitu demokrasi yang dijalankan melalui suatu lembaga perwakilan.

Ditinjau dari paham yang dianut:

- 1) Demokrasi barat/demokrasi liberal/demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada kebebasan individu/individualisme.
- 2) Demokrasi timur/demokrasi parlementer/demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang banyak dianut oleh negara yang berpaham Marxisme-Komunisme.
- 3) Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

Dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila sebagai berikut.

- 1) Pancasila sila ke-4.
- 2) Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.
- 3) UUD 1945 Pasal 1 ayat (2).
- 4) UUD 1945 Pasal 2 ayat (1).

c) Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

- 1) Demokrasi liberal/parlementer (3 November 1945–5 Juli 1959)
 - Para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.
 - Sistem multipartai.
 - *Over power* legislatif/partai politik.
 - Keterbatasan presiden/eksekutif.

- 2) Demokrasi terpimpin (1959–1965)
 - *Over power* presiden/eksekutif.
 - Keterbatasan hak peserta rakyat/legislatif.
 - Berkembangnya pengaruh komunis.
 - Meluasnya peranan TNI sebagai unsur sosial politik.
- 3) Demokrasi Pancasila (1965–sekarang)
 - Keseimbangan tuntutan masyarakat.
 - Keseimbangan kekuasaan kelembagaan negara.
 - Stabilitas masyarakat.
 - Peserta rakyat.
 - Persamaan hak warga negara di dalam hukum, pemerintahan, berserikat/ berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

2. *Pentingnya Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*

a) Demokrasi dalam kehidupan politik

Demokrasi dalam kehidupan politik dapat diterapkan dalam kegiatan pemilu.

Dasar hukum pelaksanaan pemilu sebagai berikut.

- 1) Pancasila sila keempat
- 2) UUD 1945 Pasal 22E ayat 1-6
- 3) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Asas pemilu sebagai berikut.

- 1) Langsung artinya pemilih memberikan suaranya tanpa perantara.
- 2) Umum artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih.
- 3) Bebas artinya pemilih memberikan suaranya tanpa ada paksaan.
- 4) Rahasia artinya pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun.
- 5) Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus jujur.
- 6) Adil artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan.

Tujuan pemilu dan peserta pemilu sebagai berikut.

- 1) Memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pesertanya adalah partai politik.
- 2) Memilih anggota DPD, pesertanya adalah perseorangan.
- 3) Memilih presiden dan wakil presiden, pesertanya adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik.

Penyelenggara pemilu adalah sebuah badan independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sistem pemilu sebagai berikut.

- 1) Distrik, yaitu pemilih dikelompokkan ke dalam distrik-distrik yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Satu distrik memiliki jatah satu kursi di parlemen (DPR/DPRD).

- 2) Proporsional, yaitu menekankan pada perbandingan perolehan wakil dengan perolehan dukungan suara.
 - b) Demokrasi dalam kehidupan ekonomi
Pertumbuhan perekonomian harus ditunjang dengan kondisi institusi publik yang bersih dan kredibel. Kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk ikut menciptakan dan menikmati kemakmuran.
3. *Sikap Positif Terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan*
- a) Menghormati sepenuhnya perbedaan pendapat, keyakinan, dan kepentingan orang lain dengan tidak mempertentangkannya.
 - b) Menghindari sikap dan perilaku yang angkuh, mementingkan diri sendiri dan kelompok, keras kepala, fanatik, ekstrem, serta meremehkan orang lain.
 - c) Sifat damai dan antikekerasan atas setiap permasalahan dan perbedaan.
 - d) Selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - e) Menaati hukum dan peraturan yang berlaku.
4. *Kedaulatan Rakyat*
- a) Makna kedaulatan
Kedaulatan berasal dari bahasa latin, yaitu *supremus* yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain.
 - b) Sifat kedaulatan menurut Jean Bodin
 - 1) Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
 - 2) Abadi, artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti.
 - 3) Tunggal, artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain.
 - 4) Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain.
 - c) Macam-macam kedaulatan
 - 1) Kedaulatan ke dalam (*Interne Souvereiniteit*), kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Kedaulatan ke luar (*Externe Souvereiniteit*), kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan serta memelihara keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa yang harus dihormati oleh bangsa dan negara lain untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan negara lain.
 - d) Teori-teori kedaulatan
 - 1) Teori kedaulatan Tuhan
 - Kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan atau bersumber pada Tuhan.

- Negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan (raja yang mengaku sebagai keturunan Dewa).
- Penganutnya adalah Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsillius.
- 2) Teori kedaulatan raja
 - Kekuasaan tertinggi berada di tangan raja.
 - Raja memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas, sehingga raja berada di atas undang-undang.
 - Penganutnya adalah Nicollo Machiavelli, Thomas Hobbes, dan Hegel.
- 3) Teori kedaulatan negara
 - Kekuasaan tertinggi ada pada negara.
 - Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan.
 - Penganutnya adalah Jean Bodin dan George Jellinek.
- 4) Teori kedaulatan hukum
 - Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum.
 - Penguasa ataupun rakyat wajib tunduk pada hukum, dan negara yang menciptakan hukum.
 - Penganutnya adalah Krabbe.
- 5) Teori kedaulatan rakyat
 - Kedaulatan berada di tangan rakyat.
 - Sumber teori ini adalah ajaran demokrasi.
 - Penganutnya adalah John Locke, Montesquie, dan J.J. Rousseau.
- e) Lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - Presiden
 - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - Mahkamah Agung (MA)
 - Mahkamah Konstitusi (MK)
 - Komisi Yudisial (KY)
 - Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 - Pemerintah Daerah (Pemda)
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- f) Landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat
 - Landasan idiil, yaitu Pancasila.
 - Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

5. *Sistem Pemerintahan Indonesia*

a) *Macam-macam sistem pemerintahan*

- 1) Presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik, yaitu

kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Ciri-cirinya sebagai berikut.

- Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
- Presiden dipilih langsung oleh sebuah badan atau dewan pemilih.
- Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum.
- Presiden tidak dapat membubarkan kekuasaan legislatif.
- Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan nondepartemen.
- Para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

2) Parlementer merupakan sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen berwenang mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan. Ciri-cirinya sebagai berikut.

- Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan kekuasaan yang menguasai parlemen.
- Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya berasal dari anggota parlemen.
- Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
- Kepala negara (raja/ratu atau presiden) dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.

3) Semipresidensial merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, sering disebut dualisme eksekutif atau kepemimpinan rangkap karena memimpin presiden dan perdana menteri. Ciri-cirinya sebagai berikut.

- Presiden republik dipilih melalui hak pilih umum.
- Presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar.
- Perdana menteri mengepalai kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri melalui mosi tidak percaya.

b) Sistem pemerintahan Indonesia

- 1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD 1945 Pasal 1 ayat 2).
- 2) Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3).

- 3) Anggota MPR (DPR dan DPD), presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (UUD 1945 Pasal 4 ayat 1).
 - 4) Presiden tidak dapat membubarkan DPR, artinya kekuasaan antara presiden dan DPR adalah sejajar (UUD 1945 Pasal 7C).
 - 5) Menteri-menteri negara sebagai pembantu presiden diangkat dan diberhentikan oleh presiden (UUD 1945 Pasal 17 ayat 1 dan 2).
 - 6) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (UUD 1945 Pasal 20 ayat 1).
- c) Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat
- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
 - Mengubah dan menetapkan UUD.
 - Melantik presiden dan wakil presiden.
 - Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
 - 2) Presiden memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
 - Menjalankan UU.
 - Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
 - Mengajukan RUU.
 - Membentuk Perppu.
 - Mengajukan RAPBN.
 - Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang.
 - Menetapkan perang dengan persetujuan DPR.
 - Mengangkat duta dan konsul.
 - Menerima duta dari negara lain.
 - Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
 - Memberi gelar dan tanda jasa.
 - 3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tugas sebagai berikut.
 - Menetapkan RAPBN bersama presiden.
 - Menetapkan RUU.
 - Mengawasi jalannya pemerintahan.

Hak-hak yang dimiliki DPR sebagai berikut.

- Hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah.
- Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada presiden.
- Hak imunitas, yaitu hak untuk tidak dituntut dalam pengadilan karena pernyataannya dalam sidang.
- Hak mengajukan usul atau pendapat.

- Hak mengajukan usul RUU.
 - Hak budget, yaitu hak untuk membahas RAPBN.
- 4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas sebagai berikut.
- BPK berkewajiban memeriksa tanggung jawab keuangan negara.
 - Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
- 5) Mahkamah Agung (MA) memiliki tugas sebagai berikut.
- Mengawasi jalan UU.
 - Memberi sanksi atas pelanggaran UU.
 - Mengadili pada tingkat kasasi.
- 6) Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
- Menguji kekuatan UU terhadap UUD.
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
 - Memutuskan pembubaran partai politik.
 - Memutus perselisihan hasil pemilu.
- 7) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki tugas sebagai berikut.
- Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah.
 - Ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.
 - Memberikan masukan kepada DPR atas RUU APBN pajak, pendidikan, dan agama.
 - Mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.
- 8) Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
- Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
 - Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu.
 - Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu.
 - Penetapan peserta pemilu.
 - Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.
 - Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.
- 9) Komisi Yudisial (KY), memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
- Mengawasi perilaku hakim agung.
 - Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
 - Mengusulkan nama calon hakim agung.
 - Ikut menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim.

6. *Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional*

a) Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan peraturan negara yang tertinggi dan sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

b) Ketetapan MPR

Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Terdapat dua macam putusan MPR, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ketetapan, yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam dan ke luar majelis.
- 2) Keputusan, yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.

c) Undang-Undang (UU)

Undang-undang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

d) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

Perppu merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa (Pasal 22 UUD 1945) dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut.
- 2) DPR dapat menerima atau menolak Perppu dengan tidak mengadakan perubahan.
- 3) Jika ditolak DPR, Perppu harus dicabut.

e) Peraturan pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan UU.

f) Keputusan presiden (Keppres)

Keppres merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

g) Peraturan daerah (Perda)

Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Perda provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Perda kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama dengan bupati. Peraturan desa atau yang setingkat dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga yang setingkat.

7. *Fungsi dan Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan*

a) Fungsi peraturan perundang-undangan

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum.
- 2) Untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.

- 3) Untuk memberikan rasa keadilan.
 - 4) Untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman.
 - b) Kedudukan peraturan perundang-undangan
 - 1) Sebagai hukum bagi warga negara.
 - 2) Menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara.
8. *Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangn Nasional*
- a) Asas penyusunan peraturan perundang-undangan
 - 1) Asas hierarki, artinya suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
 - 2) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya hanya boleh diuji oleh lembaga yang berwenang (DPR dan MK).
 - 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
 - 4) Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dicabut atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi.
 - 5) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya peraturan tidak berlaku di waktu sebelum diundangkannya, kecuali dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut.
 - 6) Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama.
 - 7) Konstitensi, artinya tidak ada pasal-pasal yang bertentangan, baik dalam peraturan maupun atau dengan peraturan lain.
 - b) Alur proses penyusunan peraturan perundang-undangan
 - 1) Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU)
 - RUU yang berasal dari presiden dipersiapkan oleh presiden dan diproses serta dibahas oleh pembantunya dan staf ahli menjadi draf RUU untuk kemudian diajukan kepada DPR.
 - RUU yang berasal dari DPR akan diproses oleh Panitia Ad Hoc DPR yang selanjutnya dimasukkan dalam agenda pembahasan rapat DPR.
 - 2) Proses pengajuan RUU
 - RUU diajukan oleh presiden kepada DPR dan oleh DPR itu sendiri.
 - DPR berwenang untuk mengubah, baik menambah maupun mengurangi RUU tersebut sehingga menjadi Undang-Undang (UU).
 - 3) Proses pembahasan RUU

RUU yang diajukan oleh presiden atau oleh DPR diproses melalui permusyawaratan dalam masa persidangan DPR.
 - 4) Proses penetapan RUU menjadi UU

RUU diproses untuk ditetapkan menjadi UU oleh DPR dalam forum rapat pleno DPR.

- 5) Pengesahan dan pemberlakuan UU
Setelah DPR menetapkan RUU menjadi UU, UU tersebut disahkan oleh presiden untuk diundangkan oleh menteri sekretaris negara dalam lembaran negara tentang berlakunya UU tersebut.
 - c) Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
 - 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - 2) Presiden
 - d) Kerangka peraturan perundang-undangan
 - 1) Judul berisi jenis, nomor, tahun pengundangan, dan nama peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pembukaan berisi "Dengan Rahmat Tuhan YME", jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, konsideran, dasar hukum, dan diktum.
 - 3) Batang tubuh atau isi terdiri atas bab, pasal-pasal, ayat, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, pengesahan, dan pengundangan.
9. *Otonomi Daerah*
- a) Pengertian otonomi daerah
Istilah "otonomi" berasal dari bahasa latin, yaitu kata *auto* (sendiri) dan *nomos* (aturan). Jadi, arti kata otonomi adalah pengaturan sendiri. Otonomi daerah (desentralisasi) adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004).
 - b) Nilai dasar otonomi daerah
 - 1) Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama.
 - 2) Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya.
 - 3) Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif), dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan (efisien).
 - c) Tujuan otonomi daerah
 - 1) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
 - 2) Pengembangan kehidupan demokrasi
 - 3) Keadilan
 - 4) Pemerataan
 - 5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka keutuhan NKRI
 - 6) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
 - 7) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD

- d) Asas dan prinsip pemerintahan daerah
 - 1) Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
 - 2) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota.
 - 3) Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa.
 - e) Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
 - 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
 - 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
 - 5) Penanganan bidang kesehatan
 - 6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
 - 7) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
 - 8) Pengendalian lingkungan hidup
 - 9) Pelayanan administrasi umum pemerintahan
 - 10) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
10. *Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah*
- a) DPRD sebagai badan legislatif daerah

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPRD, antara lain:

 - 1) Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
 - 2) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
 - 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, APBD, dan kerjasama internasional di daerah.
 - 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
 - 5) Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hak yang dimiliki anggota DPRD, antara lain:

 - 1) Hak interpelasi
 - 2) Hak angket
 - 3) Hak menyatakan pendapat mengajukan rancangan Perda
 - 4) Hak memilih dan dipilih
 - 5) Hak imunitas

- b) Kepala daerah sebagai badan eksekutif daerah
Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh gubernur, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota. Gubernur/bupati/walikota yang biasa disebut kepala daerah memiliki kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan DPRD masing-masing daerah. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 - 2) Mengajukan rancangan Perda.
 - 3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 - 4) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 - 5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. *Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik*

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (publik). Tujuan penerapan kebijakan publik untuk sesuatu yang telah digariskan tersebut bukan hanya bersifat abstrak belaka, namun menjadi sesuatu yang terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan kebijakan publik akan melibatkan berbagai komponen, seperti manusia, dana, dan sarana serta prasarannya.

Sebagai warga yang baik, kita harus ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, contohnya dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam menikmati hasilnya. Akibat ketidakaktifan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional karena kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

12. *Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)*

a) Pengertian HAM

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak pokok atau hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

HAM meliputi:

- 1) Bersifat pokok atau dasar
 - Hak hidup
 - Hak kebebasan/kemerdekaan
 - Hak memiliki sesuatu
 - 2) Berkembang dalam kehidupan sehari-hari
 - Hak asasi pribadi, contohnya hak memeluk agama, hak mengemukakan pendapat, dan hak berorganisasi.
 - Hak asasi ekonomi, contohnya hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual, serta hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak.
 - Hak asasi politik, contohnya hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat dan hak untuk memilih serta dipilih dalam pemilu.
 - Hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dan pemerintahan.
 - Hak asasi sosial budaya, contohnya hak mendapatkan pendidikan dan hak mengembangkan kebudayaan.
- b) Instrumen HAM
- Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Instrumen HAM di dunia internasional:
- 1) Piagam PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) atau deklarasi umum hak-hak asasi manusia disahkan tanggal 10 Desember 1948.
 - 2) Instrumen hukum lainnya yang telah disahkan dan diterima di Indonesia.
- Instrumen HAM di Indonesia:
- 1) UUD 1945 pasal 27, 28, 28 A-J, 29 ayat 2, 30, dan 31
 - 2) TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM
 - 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
 - 4) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
 - 5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran HAM
 - 6) PP No. 3 Tahun 2003 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM
- c) Piagam yang memuat perlindungan dan penegakan HAM
- 1) Di Inggris
 - *Magna Charta* (Piagam Agung) tahun 1215
 - *Petition of Rights* tahun 1628
 - *Habeas Corpus Act* tahun 1679
 - *Bill of Rights* tahun 1689
 - 2) Di Amerika Serikat
Declaration of Independence of the United States tahun 1776
 - 3) Di Prancis
Declaration des droits de l'homme et du Citoyen tahun 1789

- 4) Di dunia internasional (PBB)
Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948
- 5) Di Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945
- d) Latar belakang lahirnya perundang-undangan tentang HAM
 - 1) Adanya komitmen untuk melaksanakan UUD 1945 hasil amendemen.
 - 2) Melaksanakan amanat TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
 - 3) Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, maka harus mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 4) Masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.
 - 5) Desakan masyarakat untuk lebih mengembangkan kehidupan demokratis dengan memberikan kesempatan kepada warga negara dalam menyalurkan hak-hak yang dimilikinya.

13. Kasus Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebagai berikut.

- a) Kasus Tanjung Priok tahun 1984 di Jakarta
- b) Kasus terbunuhnya aktivis buruh Marsinah tahun 1994 di Nganjuk, Jawa Timur
- c) Kasus terbunuhnya wartawan harian umum Bernas, Udin, di Yogyakarta tahun 1996
- d) Kasus penembakan mahasiswa Trisakti

Contoh kasus pelanggaran HAM yang sering dilaporkan ke Komnas HAM sebagai berikut.

- a) Masalah tanah
- b) Masalah perburuhan
- c) Masalah perbuatan oknum aparat birokrasi yang tidak terpuji
- d) Masalah agama

Cara untuk menangani terjadinya pelanggaran HAM, antara lain:

- a) Memproses setiap pelanggaran HAM menurut ketentuan hukum yang berlaku
- b) Mengajukan semua pelanggaran HAM ke Pengadilan HAM
- c) Memberikan hukuman yang berat kepada semua pelanggar HAM dengan maksud memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya

14. Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia

- a) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Tujuan dibentuknya Komnas HAM (UU No. 39 Tahun 1999 pasal 75):

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM
- 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM untuk berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Fungsi Komnas HAM:

- 1) Pengkajian dan penelitian tentang HAM
- 2) Penyuluhan tentang HAM
- 3) Pemantauan tentang HAM
- 4) Mediasi tentang HAM

Tugas dan wewenang Komnas HAM:

- 1) Mengamati pelaksanaan HAM kemudian menyusunnya menjadi sebuah laporan
- 2) Menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat dan ruang lingkup yang diduga terdapat pelanggaran HAM
- 3) Memanggil pihak pengadu atau korban juga pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya
- 4) Memanggil saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya
- 5) Meninjau tempat kejadian atau tempat yang dianggap perlu
- 6) Memanggil pihak terkait untuk memberikan dan menyerahkan dokumen asli tertulis dengan persetujuan ketua pengadilan
- 7) Melakukan pemeriksaan terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat lain dengan persetujuan ketua pengadilan
- 8) Memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan

b) Pengadilan HAM

Menurut pasal 104 UU No. 39 tahun 1999, Pengadilan HAM dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Jenis pelanggaran HAM berat sebagai berikut.

- 1) Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Contoh:
 - Membunuh anggota kelompok
 - Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
 - Memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok tertentu ke kelompok lain

- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contoh:
 - Perbudakan
 - Pengusiran secara paksa
 - Perampasan kemerdekaan
 - Penghilangan orang secara paksa
 Tugas dan wewenang Pengadilan HAM:
 - Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat
 - Memeriksa dan menuntut perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia
 - Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan
- c) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

LBH adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Peran dan fungsi LBH sebagai berikut.

 - 1) Relawan yang membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan hukum
 - 2) Pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaran
 - 3) Pembela dalam melindungi HAM
 - 4) Penyuluh dan penyebar informasi di bidang hukum dan HAM
- d) Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
 - 1) Merupakan kantor pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum dan HAM
 - 2) Pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi di bidang hukum dan HAM
 - 3) Wahana pelatihan, pembelaan, dan penegakan hukum serta HAM

b. Sejarah Perjuangan Bangsa

1. *Latar Belakang Munculnya Pergerakan Nasional*

Kegagalan para pendahulu bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap Kolonialis Barat membuat para pejuang mencari strategi baru dalam mencapai kemerdekaan. Strategi baru yang dilakukan dengan mendirikan organisasi modern.
2. *Faktor-Faktor yang Mendorong Timbulnya Pergerakan Nasional*
 - a) Faktor intern (dari dalam)
 - 1) Penderitaan rakyat yang berkepanjangan
 - 2) Kenangan kejayaan masa lalu

- 3) Lahirnya golongan terpelajar
- b) Faktor ekstern (dari luar)
 - 1) Timbulnya paham-paham baru seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme
 - 2) Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905
 - 3) Gerakan Turki Muda
 - 4) Revolusi nasional Cina
3. *Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia*
 - a) Budi Utomo

Tokoh yang memelopori lahirnya Budi Utomo adalah Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908 dengan ketuanya adalah dr. Sutomo.
 - b) Sarekat Islam (SI)

Organisasi SI mulanya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi di Surakarta pada 1911. Untuk memperluas gerak usahanya, SDI diubah menjadi SI. Pada perkembangannya, SI disusupi oleh orang yang beraliran sosialis ekstrem. Akibatnya, pada 1921 SI pecah menjadi dua, yaitu SI Merah pimpinan Semaun dan SI Putih pimpinan H.O.S. Cokroaminoto.
 - c) Indische Partij

Didirikan di Bandung, tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr. Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Usaha-usaha yang dilakukan, antara lain:

 - 1) Menerapkan cita-cita kesatuan nasional Indonesia
 - 2) Berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Indonesia (Hindia)
 - 3) Memperbesar pengaruh pro Hindia (Indonesia) di dalam pemerintahan
 - 4) Memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia dengan memperkuat mereka yang lemah ekonominya
 - d) Perhimpunan Indonesia (PI)

Tokoh pendiri PI adalah para mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, antara lain R.P. Sosrokartono dan R. Husein Jayadiningrat. Kegiatan PI pada mulanya mengadakan pertemuan antar-anggota untuk mendiskusikan nasib bangsa. PI menerbitkan majalah "Hindia Poetera" untuk memuat tulisan para anggotanya.
 - e) Partai Nasional Indonesia (PNI)

PNI didirikan di Bandung pada 4 Juli 1927 oleh Ir. Soekarno. Kegiatan-kegiatan PNI dianggap membahayakan kolonialis Belanda sehingga pada tahun 1930 para tokohnya ditangkap.
 - f) Partai Indonesia Raya (Parindra)

Parindra merupakan gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Parindra didirikan pada 25 Desember 1935.

Usaha-usaha yang dilakukan Parindra, antara lain:

- 1) Pendidikan kepada rakyat
 - 2) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
 - 3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- g) Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
Didirikan di Jakarta pada 24 Mei 1937 oleh A.K. Gani, Mr. Moh. Yamin, dan Mr. Amir Syarifudin. Tujuannya untuk Indonesia merdeka dengan asas nasionalis dan demokrasi.
- h) Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
GAPI merupakan gabungan dari partai-partai politik yang ada di Indonesia yang dibentuk pada 21 Mei 1939. Latar belakang terbentuknya GAPI, yaitu menuntut kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan Belanda secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 10 tahun.
- i) Pergerakan wanita
Pergerakan wanita di Indonesia dipelopori oleh R.A. Kartini. R.A. Kartini memengaruhi kaum wanita untuk memperjuangkan emansipasi.
Oleh karena itu, muncullah tokoh-tokoh wanita, antara lain:
- 1) Dewi Sartika mendirikan "Sekolah Kautamaan Istri" di Bandung, pada 1954
 - 2) R.A. Sabarudin dan R.A. Sutinah Joyopranoto mendirikan Putri Merdiko
 - 3) Kongres wanita Indonesia diadakan pada 22-28 Desember 1928 di Yogyakarta.
Berdasarkan hasil kongres, terbentuklah Perserikatan Istri Indonesia (PII).
4. *Pendudukan Militer Jepang di Indonesia*
- a) Masuknya Jepang di Indonesia
Faktor yang menyebabkan Jepang berhasil masuk ke Asia Timur dan Asia Tenggara sebagai berikut.
- 1) Jepang berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii, pada tanggal 7 Desember 1941
 - 2) Negara-negara induk (Inggris, Prancis, dan Belanda) sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman
 - 3) Bangsa-bangsa Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia)
- Tujuan awal Jepang datang ke Indonesia untuk menanamkan kekuasaannya dan untuk menjajah Indonesia.
- b) Kebijakan Pemerintah Jepang
- 1) Bidang ekonomi
 - Perluasan areal persawahan untuk meningkatkan produksi beras
 - Melakukan pengawasan pertanian dan perkebunan yang bertujuan untuk mengendalikan harga barang

- 2) Bidang pemerintahan
 - Pemerintahan pendudukan Jepang adalah pemerintahan yang sangat diktator.
 - Untuk memudahkan pengawasan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian yang bertujuan agar semua daerah dapat dikendalikan untuk kepentingan pemerintahan bala tentara Jepang.
- 3) Bidang militer
 - Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi, baik militer maupun semimiliter, dengan tujuan bangsa Indonesia mau membantu pemerintahan Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan Sekutu.
 - Beberapa organisasi militer yang dibentuk pemerintahan Jepang sebagai berikut.
 - *Seinendan* (barisan pemuda)
 - *Keibodan* (barisan pembantu polisi)
 - *Fujinkai* (barisan wanita)
 - *Heiho* (pembantu prajurit Jepang)
 - *Syuisyintai* (barisan pelopor)
 - *Jawa Hokokai* (perhimpunan kebaktian rakyat Jawa)
 - *PETA* (pembela tanah air)
- 4) Bidang sosial budaya
 - Pada masa pemerintahan Jepang, media massa diawasi dengan ketat.
 - Namun demikian, surat kabar dan radio ikut berfungsi memperluas perkembangan bahasa Indonesia.
5. *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Jepang*
 - a) Perjuangan melalui organisasi buatan Jepang
 - 1) Memanfaatkan gerakan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)
 - PUTERA dibentuk pada 1 Maret 1943 yang bertujuan agar kaum nasionalis dan intelektual menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang.
 - Oleh para pemimpin Indonesia, PUTERA justru dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang.
 - Pemimpin PUTERA dikenal dengan Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur.
 - 2) Memanfaatkan Barisan Pelopor (*Syuisyintai*)
 - Barisan Pelopor dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan kepala sekretariatnya, yaitu Sudiro.
 - Anggota pengurusnya, antara lain Chaerul Saleh, Asmara Hadi, Sukardjo Wiryopranoto, dan Otto Iskandar Dinata.
 - Organisasi ini dimanfaatkan sebagai penyalur aspirasi nasionalisme.

- 3) Memanfaatkan Badan Penasihat Pusat (*Chuo Sangi In*)
 - Badan ini dibentuk pada 5 September 1943 dasar anjuran Jenderal Hideki Tojo (Perdana Menteri Jepang).
 - Diketuai Ir. Soekarno, anggotanya berjumlah 23 orang Jepang dan 20 orang Indonesia.
 - Tugas badan ini adalah memberi nasihat atau pertimbangan kepada Seiko Shikikan (penguasa tertinggi militer Jepang di Indonesia).
 - Para pemimpin Indonesia memanfaatkan *Chuo Sangi In* untuk menggembleng kedisiplinan.
- b) Perjuangan melalui organisasi Islam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)

MIAI merupakan perkumpulan organisasi Islam yang didirikan pada 21 September 1937. Pemerksa berdirinya organisasi ini, antara lain K.H. Mas Mansur, K.H. Wahab Hasbullah, dan Wondoamiseno. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, organisasi ini tetap diperbolehkan berdiri. Hal ini merupakan pendekatan Jepang terhadap golongan nasionalis Islam agar umat Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik.
- c) Perjuangan melalui gerakan bawah tanah
 - 1) Gerakan kelompok Sutan Syahrir
 - 2) Gerakan kelompok Amir Syarifuddin
 - 3) Golongan persatuan mahasiswa
 - 4) Kelompok Sukarni
 - 5) Kelompok pemuda Menteng 31
- d) Perjuangan melalui perlawanan bersenjata
 - 1) Perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat
 - Perlawanan rakyat di Cot Pleing, Aceh, pada 10 November 1942.
 - Perlawanan rakyat di Pontianak pada 16 Oktober 1943.
 - Perlawanan rakyat di Singaparna, Jawa Barat, pada 25 Februari 1944.
 - Perlawanan rakyat di Cidempet, Indramayu, pada 30 Juli 1944.
 - Perlawanan rakyat di Irian Jaya, pada 1944.
 - 2) Perlawanan bersenjata yang dilakukan PETA
 - Perlawanan PETA di Blitar, pada 29 Februari 1945.
 - Perlawanan PETA di Meureudu, Aceh, pada November 1944.
 - Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap, pada April 1945.
6. *Alasan Jepang Membentuk BPUPKI*

Pada akhir tahun 1944, posisi Jepang di berbagai kawasan mulai terdesak. Keadaan ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut.

 - a) Jepang terus-menerus mengalami kekalahan dari serbuan Sekutu dalam Perang Pasifik.

b) Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dan tentara PETA.

Pada 17 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo meletakkan jabatan dan diganti oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Tugas utama perdana menteri baru, yaitu memulihkan kewibawaan Jepang di hadapan bangsa-bangsa Asia yang baru saja dibebaskan oleh Jepang dari cengkeraman imperialis Eropa.

Langkah politik Perdana Menteri Koiso terhadap Indonesia, antara lain:

- a) Menjanjikan kemerdekaan Indonesia di depan parlemen Jepang
- b) Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang

Jepang memberikan janji tersebut agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepangnya *Dokuritsu Junbi Cosakai*.

BPUPKI secara resmi berdiri pada 28 Mei 1945. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari berbagai daerah dan aliran. Ketua BPUPKI adalah K.R.T. Radjiman Wediodiningrat.

7. *Penyusunan Dasar dan Konstitusi Untuk Negara Indonesia*

BPUPKI membentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia Sembilan, terdiri atas:

- a) Ir. Soekarno (ketua)
- b) Drs. Moh. Hatta (anggota)
- c) Mr. Muh. Yamin (anggota)
- d) Mr. Ahmad Soebarjo (anggota)
- e) Mr. A.A. Maramis (anggota)
- f) Abdulkahar Muzakkir (anggota)
- g) Wahid Hasyim (anggota)
- h) Haji Agus Salim (anggota)
- i) Abikusno Cokrosuyoso (anggota)

Pada 22 Juni 1945, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Sembilan yang memuat rancangan asas dan tujuan Indonesia merdeka. Dokumen laporan tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta.

Pada 10–17 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua dengan tujuan membahas rencana undang-undang dasar, termasuk pembukaan atau preambulunya oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Hasil keputusan sidang BPUPKI yang kedua sebagai berikut.

- a) Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka
- b) Piagam Jakarta menjadi pembukaan Hukum Dasar itu
Untuk pembukaan Hukum Dasar diambil dari Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan sebagai berikut.

- c) Pada alinea ke-4, perkataan *Hukum Dasar* diganti dengan *Undang-Undang Dasar*.
- d) "... berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab," diganti dengan "berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab."
- e) Di antara "Permusyawaratan perwakilan" dalam Undang-Undang Dasar ditambah dengan garis miring (/).

8. *Pembentukan PPKI*

Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepangnya *Dokuritsu Junbi Inkai*. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan wakil ketua PPKI adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan Mr. Ahmad Subardjo sebagai penasihatnya.

Pada 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Wediodiningrat dipanggil menghadap Marsekal Terauchi di Dalath, Vietnam. Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut.

- a) Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia.
- b) Untuk pelaksanaan kemerdekaan telah dibentuk PPKI.
- c) Pelaksanaan kemerdekaan segera setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dimulai dari Pulau Jawa kemudian pulau-pulau lain.
- d) Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

9. *Perbedaan Pandangan Antarkelompok Pejuang*

Setelah Jepang mengalami kekalahan di berbagai kawasan, muncul perbedaan antarkelompok pejuang mengenai masalah proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

- a) Kelompok pejuang senior, yaitu kelompok anggota PPKI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang berpendapat proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang dan harus dibicarakan dalam rapat PPKI terlebih dahulu.
- b) Kelompok pejuang bawah tanah yang dipimpin oleh Sutan Syahrir dan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Chaerul Saleh berpendapat proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa menunggu rapat PPKI yang dibentuk oleh Jepang.

Pada 15 Agustus 1945, pihak pemuda mendesak Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945, tetapi Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menolak usulan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis.

Tidak adanya kesepakatan antara kelompok pejuang senior dengan kelompok pejuang muda menyebabkan kelompok pejuang muda mengamankan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta keluar dari Jakarta. Para pemuda beranggapan kedua tokoh tersebut telah dipengaruhi oleh pihak Jepang.

10. *Peristiwa Rengasdengklok*

Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa yang diawali oleh adanya perbedaan pandangan antara kelompok muda dengan kelompok tua tentang waktu dan cara pelaksanaan proklamasi. Rengasdengklok adalah nama daerah yang berada di sebelah utara Karawang, Jawa Barat. Alasan memilih Rengasdengklok karena Rengasdengklok menjadi satu-satunya daerah yang bebas dari kekuasaan Jepang serta letaknya yang jauh dari Jakarta.

Tokoh yang terkait dalam peristiwa Rengasdengklok sebagai berikut.

- a) Golongan tua: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo
- b) Golongan muda: Syudanco Singgih, Yusuf Kunto, Sukarni, Syudanco Subeno, dan Iwa Kusumasumantri.

Arti pertemuan Rengasdengklok, bukti adanya keinginan semua pihak untuk hidup merdeka.

11. *Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*

a) Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan

Tempat perumusan naskah proklamasi adalah rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Tokoh-tokoh yang menyusun naskah proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Tokoh yang menyaksikan penyusunan naskah proklamasi adalah Sudiro, B.M. Diah, dan Sukarni. Atas usul Sukarni, naskah proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan dilakukan revisi penulisannya.

b) Upacara proklamasi kemerdekaan

Berdasarkan kesepakatan, teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dibacakan pada 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada. Namun, pasukan Jepang telah mengepung dengan ketat lapangan Ikada. Untuk menghindari bentrokan antara rakyat dan pasukan Jepang, pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan diselenggarakan di rumah Ir. Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur No. 56, Jakarta. Setelah semua pihak yang dianggap berkepentingan hadir, proses proklamasi pun dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

c) Arti penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi merupakan puncak kesadaran berbangsa dan cita-cita kemerdekaan sejak lahirnya Boedi Utomo 1908. Proklamasi bukan akhir perjuangan dalam bentuk pemerintahan yang berdaulat, tetapi awal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

12. *Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan*

Berita proklamasi kemerdekaan disebarluaskan melalui sarana-sarana sebagai berikut.

- a) Kantor berita Domei
- b) Radio
- c) Kawat telepon
- d) Surat kabar
- e) Utusan ke berbagai daerah
- f) Pamflet, poster, dan coretan-coretan pada tembok

13. *Proses Pembentukan Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia*

Unsur-unsur yang harus dilengkapi bagi berdirinya suatu negara baru sebagai berikut.

- a) Rakyat
- b) Wilayah
- c) Pemerintahan yang berdaulat
- d) Pengakuan dari negara lain

PPKI mengadakan sidang-sidang untuk melengkapi syarat terbentuknya negara serta upaya memenuhi kelengkapan pemerintahan yang diperlukan.

a) Sidang PPKI I

Dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 dan dihadiri oleh 27 orang anggota yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta.

Hasil keputusan sidang sebagai berikut.

- 1) Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- 2) Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden
- 3) Rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia yang akan membantu tugas presiden

b) Sidang PPKI II

Dilaksanakan pada 19 Agustus 1945.

Hasil keputusan sidang sebagai berikut.

- 1) Menetapkan 12 kementerian sebagai pembantu presiden
- 2) Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk para gubernurnya
- 3) Diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tentara kebangsaan

c) Sidang PPKI III

Dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945.

Hasil keputusan sidang sebagai berikut.

- 1) Membentuk Komite Nasional Indonesia
- 2) Membentuk PNI sebagai satu-satunya partai di Indonesia (tetapi kemudian dibatalkan)

3) Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

14. *Faktor Penyebab Konflik Indonesia-Belanda*

a) Kedatangan tentara Sekutu dan NICA

Peristiwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 menunjukkan secara de jure wilayah jajahan Jepang dikuasai sekutu sebagai pihak yang menang dalam Perang Dunia II. Pada 29 September 1945, pasukan sekutu mendarat di Indonesia. Mereka bertugas melucuti tentara Jepang.

Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara, yang bernama *South East Asia Command* (SEAC) membentuk suatu komando khusus yang diberi nama *Allied Forces Netherland East Indies* (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas utama AFNEI, yaitu mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang.

Karena sekutu secara diam-diam membawa orang-orang *Netherland Indies Civil Administration* (NICA) (pegawai-pegawai sipil Belanda), bangsa Indonesia curiga dan akhirnya menimbulkan permusuhan.

b) Kedatangan Belanda (NICA) berupaya untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia

NICA berusaha mempersenjatai kembali *Koninklijk Nerderlands Indisch Leger* (KNIL). KNIL adalah tentara kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Orang-orang NICA dan KNIL yang berada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, mengadakan provokasi sehingga memancing kerusuhan.

15. *Perjuangan Rakyat di Berbagai Daerah*

a) Pertempuran Surabaya

Mulanya, pemerintah Jawa Timur tidak mau menerima kedatangan sekutu, tetapi kemudian dibuat kesepakatan dengan hasil sebagai berikut.

- 1) Inggris berjanji tidak mengikutsertakan angkatan perang Belanda.
- 2) Menjalin kerja sama antara Inggris dengan Indonesia untuk menciptakan keamanan dan perdamaian.
- 3) Akan dibentuk kontak biro agar kerja sama berjalan lancar.
- 4) Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang.

Dengan kesepakatan tersebut, Inggris diperkenankan memasuki kota Surabaya. Ternyata, pihak Inggris ingkar janji. Inggris melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok pada 26 Oktober 1945, serta menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata mereka. Kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan Inggris terjadi pada 27 Oktober 1945.

Untuk menghindari kontak senjata yang meluas, Presiden Soekarno mengadakan perundingan dengan Jenderal D.C. Hawthorn. Namun, hasil perundingan tersebut dilanggar oleh pihak sekutu Inggris. Kontak senjata kembali meletus

pada 10 November 1945. Melalui siaran radio, Bung Tomo berpidato untuk membangkitkan semangat juang arek-arek Surabaya.

b) **Pertempuran Ambarawa**

Pertempuran ini berlangsung dari 21 November-15 Desember 1945 antara TKR dengan tentara sekutu. Peristiwa tersebut berawal dari kedatangan tentara sekutu di Semarang, yang pada awalnya bertujuan untuk mengurus tawanan perang. Akan tetapi, secara diam-diam, tentara sekutu diboncengi NICA dan mempersenjatai para bekas tawanan perang di Ambarawa dan Magelang.

c) **Pertempuran Medan Area**

Pertempuran pertama pecah pada 13 Oktober 1945 ketika lencana merah putih diinjak-injak oleh tamu di sebuah hotel. Para pemuda kemudian menyerbu hotel tersebut sehingga mengakibatkan banyak korban luka-luka. Bentrokan antara tentara sekutu dengan rakyat menjalar ke seluruh Kota Medan sehingga dikenal dengan pertempuran Medan Area.

16. *Peranan Dunia Internasional*

a) **Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Dewan Keamanan PBB berperan dalam menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).

KTN terdiri dari:

- 1) Australia (diwakili oleh Richard C. Kirby), atas pilihan Indonesia
- 2) Belgia (diwakili oleh Paul Van Zeeland), atas pilihan Belanda
- 3) Amerika Serikat (diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham), atas pilihan Australia dan Belgia

KTN berhasil mempertemukan Indonesia-Belanda dalam perundingan yang berlangsung pada 8 Desember 1947 di atas kapal perang Amerika Serikat "Renville" yang sedang berlabuh di teluk Jakarta. Perundingan ini dikenal dengan Perundingan Renville.

b) **Peranan Konferensi Asia di New Delhi**

Waktu Belanda melakukan aksi militernya, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Birma U Aung San memprakarsai Konferensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi, pada 20-23 Januari 1949.

Konferensi Asia menghasilkan resolusi yang disampaikan kepada PBB yang berisi sebagai berikut.

- 1) Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta
- 2) Pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949
- 3) Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
- 4) Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950

Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi kepada Belanda dan Indonesia, yang berisi sebagai berikut.

- 1) Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya oleh Indonesia.
- 2) Pembebasan dengan segera tanpa bersyarat semua tahanan politik di dalam daerah Indonesia oleh Belanda.
- 3) Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta.
- 4) Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu secepatnya.
- 5) Komisi Tiga Negara diganti namanya menjadi Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI = *United Nations Commission for Indonesia*). Tugas UNCI untuk membantu melancarkan perundingan-perundingan.

17. *Aktivitas Diplomasi Indonesia*

a) Perundingan Linggajati

Perundingan ini diadakan pada 10 November 1946 di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Prof. Scermerhorn, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sjahrir.

Hasil Perundingan Linggajati ditandatangani pada 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk (sekarang Istana Merdeka), Jakarta, yang berisi sebagai berikut.

- 1) Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
- 2) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
- 3) Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

b) Perundingan Renville

Perundingan ini diadakan pada 8 Desember 1947 di atas kapal perang Renville. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjoatmodjo, seorang Indonesia yang memihak Belanda.

Hasil Perundingan Renville baru ditandatangani pada 17 Januari 1948 yang intinya sebagai berikut.

- 1) Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia-Belanda sampai pada waktu yang ditetapkan oleh kerajaan Belanda untuk mengakui Negara Indonesia Serikat (NIS).
- 2) Akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan penduduk di daerah-daerah Jawa, Madura, dan Sumatera menginginkan daerahnya bergabung dengan RI atau negara bagian lain dari Negara Indonesia Serikat (NIS).

- 3) Setiap negara (bagian) berhak tinggal di luar NIS atau menyelenggarakan hubungan khusus dengan NIS atau Belanda.
- c) Persetujuan Roem-Royen

Pada 7 Mei 1949, Mr. Moh. Roem selaku ketua delegasi Indonesia dan Dr. Van Royen selaku ketua delegasi Belanda, masing-masing membuat pernyataan sebagai berikut.

 - 1) Pernyataan Mr. Moh. Roem
 - Mengeluarkan perintah kepada “Pengikut Republik yang bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya
 - Bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan
 - Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat “penyerahan” kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS) dengan tidak bersyarat
 - 2) Pernyataan Dr. Van Royen
 - Menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
 - Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik
 - Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang berada di daerah-daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1948
 - Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS)
 - Berusaha dengan sungguh-sungguh agar Konferensi Meja Bundar segera diadakan setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta
- d) Konferensi Meja Bundar (KMB)

Pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Belanda).

Isi dari persetujuan KMB sebagai berikut.

 - 1) Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949
 - 2) Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan
 - 3) Antara RIS dengan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda
 - 4) Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda
 - 5) Pembentukan Angkatan Perang RIS (APRIS) dengan TNI sebagai intinya

18. Pengaruh Konflik Indonesia–Belanda

- a) Terbentuknya negara-negara bagian

Belanda menghendaki sebanyak mungkin negara bagian dalam RIS sebagai negara bonekanya.

Negara-negara yang dibentuk Belanda sebagai berikut.

- 1) Negara Indonesia Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku)
 - 2) Negara Sumatera Timur
 - 3) Negara Madura
 - 4) Negara Pasundan
 - 5) Negara Sumatera Selatan
 - 6) Negara Jawa Timur
- b) Perjuangan kembali ke Negara Republik Indonesia
Pada 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno menandatangani rancangan undang-undang yang kita kenal dengan UUDS pada 15 Agustus 1950.

19. *Pemilu Tahun 1955*

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 dilaksanakan dalam dua gelombang sebagai berikut.

- a) Gelombang I tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b) Gelombang II tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante (badan pembuat UUD).

Dalam pelaksanaannya, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu tahun 1955 diikuti oleh banyak partai politik, organisasi, maupun perorangan sehingga DPR terbagi dalam banyak fraksi.

Fraksi yang terbesar adalah Fraksi Masyumi (60 anggota), Fraksi PNI (58 anggota), Fraksi NU (47 anggota), dan Fraksi PKI (32 anggota). Seluruh anggota DPR hasil Pemilu tersebut berjumlah 272 anggota, sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang.

20. *Dekret Presiden 5 Juli 1959*

Tujuan Pemilu 1955 untuk membentuk DPR dan Konstituante. Tugas Konstituante, yaitu menyusun atau merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Namun, sampai tahun 1958, Konstituante belum juga berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah Konstituante gagal menetapkan UUD, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan di Istana Merdeka, pada 5 Juli 1959.

Isi dari Dekrit Presiden sebagai berikut.

- a) Pembubaran Konstituante
- b) Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
- c) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

21. *Kehidupan Politik Nasional dan Daerah*

Semenjak diakuinya kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960, Indonesia mengalami berbagai situasi sebagai dampak dari keadaan politik nasional.

Beberapa hal yang menjadi persoalan, di antaranya hubungan pusat-daerah, persaingan ideologi, dan pemberontakan di daerah.

a) Hubungan pusat dan daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah kurang harmonis. Hal ini disebabkan oleh masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah.

Akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat, antara lain:

- 1) Di Padang, Sumatera Barat, berdiri Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein.
- 2) Di Medan, Sumatera Utara, berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon.
- 3) Di Sumatera Selatan, berdiri Dewan Garuda yang dipimpin oleh Kolonel Barlian.
- 4) Di Manado, Sulawesi Utara, berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Samual.

b) Persaingan ideologi

Persaingan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis atau sosialis mulai terasa sejak tahun 1950. Partai-partai politik terpecah-pecah dalam berbagai ideologi yang sukar dipertemukan dan hanya mementingkan golongannya sendiri.

Saat itu, kabinet yang berkuasa silih-berganti. Dalam waktu singkat, tahun 1950–1955 terdapat empat buah kabinet yang memerintah, yaitu:

- 1) Kabinet Natsir (6 September 1950–20 Maret 1951)
- 2) Kabinet Sukiman (26 April 1951–Februari 1952)
- 3) Kabinet Wilopo (April 1952–2 Juni 1953)
- 4) Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953–24 Juli 1955)

c) Pemberontakan-pemberontakan di daerah

- 1) Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung, pada 23 Januari 1950.
- 2) Pemberontakan Andi Azis di Makassar, pada 5 April 1950.
- 3) Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon, pada 25 April 1950.
- 4) Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Indonesia bagian timur, pada 1 Maret 1957.
- 5) Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, pada 15 Februari 1958.

22. *Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat*

Salah satu keputusan dalam Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus–2 September 1949 adalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya

satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun, setelah menunggu bertahun-tahun, Belanda tidak juga mau membicarakannya. Jadi, bangsa Indonesia berjuang untuk merebutnya kembali.

Dalam perjuangan merebut kembali Irian Barat, bangsa Indonesia menggunakan berbagai upaya melalui diplomasi dan konfrontasi. Perjuangan melalui konfrontasi dilakukan dengan cara konfrontasi politik, ekonomi, dan militer.

Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan komando yang terkenal sebagai *Tri Komando Rakyat* yang isinya sebagai berikut.

- a) Gagalakan pembentukan Negara Papua buatan Belanda kolonial.
- b) Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
- c) Bersiaplah untuk mobilitas umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dengan dikeluarkannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda. Pada Januari 1962, pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Panglima Komando Mandala adalah Mayor Jenderal Soeharto.

Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat, dibagi dalam tiga fase:

- a) Fase infiltrasi (sampai akhir 1962)
- b) Fase eksploitasi (mulai awal 1963)
- c) Fase konsolidasi (awal 1964)

Kesungguhan Indonesia merebut kembali Irian Barat mengundang simpati diplomat AS untuk mengusulkan rencana penyelesaian masalah Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda menerima dan menandatangani Persetujuan New York pada 15 Agustus 1962.

Isi Perjanjian New York sebagai berikut.

- a) Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB, yaitu *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) pada 1 Oktober 1962.
- b) Pada 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat, berdampingan dengan bendera Belanda yang selanjutnya akan diturunkan pada 31 Desember 1962 untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
- c) Pemerintah UNTEA berakhir pada 1 Mei 1963 dan pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.
- d) Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada 1 Mei 1963.
- e) Rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI.

Sebagai wujud pelaksanaan Persetujuan New York, diselenggarakan Pepera. Hasil Pepera membuktikan secara bulat Irian Barat tetap bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera disetujui PBB pada 19 November 1969.

23. *Peristiwa Madiun/PKI*

Pemberontakan PKI di Madiun, merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Pemimpin pemberontakan ini, antara lain Amir Syarifudin dan Muso. Pada 18 September 1948, PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya kemudian mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan meruntuhkan pemerintah RI untuk kemudian diganti dengan pemerintahan yang berdasar paham komunis.

Dalam usaha mengatasi keadaan, Panglima Jenderal Sudirman segera memerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono di Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak. Pada 30 September 1948, seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musso yang melarikan diri ke luar kota dapat dikejar dan ditembak TNI, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Ngrambe, Grobogan, lalu dihukum mati.

24. *Peristiwa DI/TII*

a) Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Pada 7 Agustus 1949, di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kartosuwiryo memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI), sedangkan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan ini dibentuk saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gerombolan DI/TII ini dapat leluasa melakukan gerakannya dengan membakar rumah-rumah rakyat, membongkar rel kereta api, menyiksa, dan merampok harta benda penduduk.

Dalam menghadapi aksi DI/TII, pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerombolan ini. Pada 1960, pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi "Pagar Betis" dan operasi "Bratayudha". Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo beserta para pengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi "Bratayudha" di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat.

b) Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Untuk menumpas pemberontakan ini, pada Januari 1950, pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut "Gerakan Banteng Negara" (GBN) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini.

c) Pemberontakan DI/TII di Aceh

Pemberontakan DI/TII di Aceh, dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh. Daud Beureuh merasa kecewa karena status Aceh pada 1950, diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam menghadapi pemberontakan DI/TII di Aceh ini, semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata. Selanjutnya atas prakarsa Kolonel M. Yasin, Pangdam I/Iskandar Muda, pada 17–21 Desember 1962 diselenggarakan “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” yang mendapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan DI/TII di Aceh dapat dipadamkan.

d) Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan, juga timbul pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS). Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan.

Untuk menghadapi pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan ini, pemerintah melakukan operasi militer. Baru pada Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati.

e) Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pada Oktober 1950 DI/TII, juga melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan TNI.

Dalam menghadapi gerombolan DI/TII tersebut, pemerintah pada mulanya memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menyerah. Akan tetapi setelah menyerah, Ibnu Hajar melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya, pemerintah mengerahkan pasukan TNI sehingga akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap.

25. *Peristiwa G 30 S/PKI*

Melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan serta kondisi sosial politik yang penuh dengan gejolak pada awal tahun 1960-an, PKI berusaha menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan. Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari 30 September 1965, yaitu terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. Penculikan ini dilakukan oleh sekelompok militer yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung.

Para perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh sekelompok G 30 S/PKI tersebut sebagai berikut.

- a) Letnan Jenderal Ahmad Yani
- b) Mayor Jenderal R. Suprpto
- c) Mayor Jenderal M.T. Haryono
- d) Mayor Jenderal S. Parman
- e) Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan
- f) Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
- g) Letnan Satu Pierre Andreas Tendean

Dalam peristiwa tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari pembunuhan. Akan tetapi, puteri beliau yang bernama Ade Irma Nasution tewas akibat tembakan para penculik. Peristiwa pembunuhan oleh G 30 S/PKI juga terjadi di Yogyakarta, yang mengakibatkan gugurnya dua orang perwira TNI AD, yaitu Kolonel Katamsa dan Letnan Kolonel Sugiyono.

Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Kostrad memimpin operasi penumpasan terhadap Gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam operasi ini sebagai berikut.

- a) Pada 1 Oktober 1965, berhasil merebut kembali RRI dan Kantor Telekomunikasi.
- b) Pada 2 Oktober 1965, operasi yang dilakukan oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo berhasil menguasai beberapa tempat penting termasuk daerah sekitar Bandara Halim Perdanakusumah yang menjadi pusat kegiatan Gerakan 30 September.

Pada tanggal 3 Oktober 1965, dilakukan operasi pembersihan di daerah Lubang Buaya. Atas petunjuk seorang anggota polisi, akhirnya ditemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat dikuburkan.

26. *Peristiwa Politik Penting pada Masa Orde Baru*

a) Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)

Sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap PKI yang telah melakukan pengkhianatan terhadap negara serta kondisi ekonomi yang memburuk melatarbelakangi munculnya kesatuan-kesatuan aksi. Pada tanggal 10 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) memelopori kesatuan-kesatuan aksi untuk menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Isi Tritura sebagai berikut.

- 1) Pembubaran PKI
 - 2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI
 - 3) Penurunan harga dan perbaikan ekonomi
- b) Surat Perintah Sebelas Maret
- Pada tanggal 11 Maret 1966, di Istana Bogor, Presiden Soekarno menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).
- c) Sidang Umum MPRS
- Sidang Umum IV MPRS yang diselenggarakan pada 17 Juni 1966 menghasilkan beberapa ketetapan yang dapat memperkuat tegaknya Orde Baru, yaitu:
- 1) Ketetapan MPRS No. IX tentang pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret
 - 2) Ketetapan MPRS No. XXV tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia

- 3) Ketetapan MPRS No. XXIII tentang Pembaruan Landasan Kebijakan ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
 - 4) Ketetapan MPRS No. XIII tentang Pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada Pengemban Tap MPRS No. IX
- d) Nawaksara
- MPRS meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam Sidang Umum MPRS 1966 atas terjadinya pemberontakan G30 S/PKI, kemerosotan ekonomi dan moral. Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya pada 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara (sembilan pasal).
- Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan presiden. Pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Ketetapan MPRS No. IX, yaitu Jenderal Soeharto.
- e) Politik luar negeri
- Landasan kebijakan politik luar negeri orde baru telah ditetapkan dalam Tap No. XII/MPRS/1966. Menurut rumusan yang telah ditetapkan MPRS, politik luar negeri RI adalah bebas dan aktif, yaitu tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta militer.
- Sebagai wujud pelaksanaannya, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.
- 1) Menghentikan politik konfrontasi dengan Malaysia
 - 2) Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966
 - 3) Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) pada 8 Agustus 1967
- f) Pemilihan umum (pemilu)
- Pemilihan umum pertama pada masa orde baru dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 1977 yang diikuti oleh 10 partai, yaitu PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan Golkar. Pemilu ini dimenangkan oleh Golkar.
- Pemilu tahun 1977 diikuti oleh tiga organisasi peserta pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pemilu-pemilu di Indonesia, selama orde baru selalu dimenangkan oleh Golkar.
- g) Sidang MPR Tahun 1973
- Pada Maret 1973, diadakan sidang MPR yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.
- 1) Tap No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pengganti Manipol
 - 2) Tap No. IX/MPR/1973 tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI

- 3) Tap No. XI/MPR/1973 tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden RI
- h) Berakhirnya Orde Baru

Sejak pertengahan tahun 1996, situasi politik memanas di Indonesia. Rakyat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, dan demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia. Hasil Pemilu 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR/MPR banyak mengandung unsur nepotisme.

Terpilihnya Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat, sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain memanasnya situasi politik, Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara. Melihat kondisi bangsa Indonesia tersebut, para mahasiswa memelopori demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah orde baru.

Aksi demonstrasi ini berhasil menggulingkan orde baru sehingga tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Pemilu pertama pada orde reformasi dilaksanakan pada 7 Juni 1998 yang diikuti oleh 48 partai politik. Suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Dalam Sidang Umum MPR bulan Oktober 1999, terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang dipilih melalui voting (pemungutan suara). Pada 5 April 2004, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilu untuk memilih presiden secara langsung dilaksanakan dua putaran, yaitu tanggal 5 Juli dan 20 September 2004. Presiden dan wakil presiden terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung ini merupakan pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi presiden dengan wakilnya adalah Boediono. Pada pemilu 2014, Joko Widodo terpilih menjadi presiden dengan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden.

c. Peranan Bangsa Indonesia Dalam Tatanan Regional Dan Global

1. Konferensi Asia Afrika (KAA)

a) Latar belakang KAA

Bangsa-bangsa Asia-Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah, yakni sama-

sama pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Semakin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa Asia-Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Perubahan politik setelah Perang Dunia II berakhir, yaitu situasi internasional diliputi kecemasan akibat perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur.

Di antara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka, masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu. Kepentingan politik luar negeri Indonesia untuk menggalang kekuatan dari negara-negara Asia-Afrika agar mendukung merebut Irian Barat. Bangsa-bangsa Asia-Afrika tidak ingin terlibat dalam perang dingin.

b) Sejarah terwujudnya KAA

Terwujudnya KAA didahului oleh Konferensi Colombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Colombo dilaksanakan pada 28 April–2 Mei 1954 dengan dihadiri oleh wakil dari 5 negara, yaitu Ali Sastroamidjyo (Indonesia), Jawaharlal Nehru (India), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu (Birma), dan Sir John Kotelawala (Srilanka). Konferensi Bogor dilaksanakan pada 28–31 Desember 1954 sebagai kelanjutan dari Konferensi Colombo.

c) Tujuan KAA

- 1) Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antarbangsa-bangsa Asia-Afrika
- 2) Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta
- 3) Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika
- 4) Meninjau kedudukan Asia-Afrika dan rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerja sama internasional

d) Pelaksanaan KAA

Konferensi Asia-Afrika berlangsung pada 18–25 April 1955, bertempat di Gedung Merdeka, Bandung.

Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara (termasuk 5 negara sponsor), yaitu:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| – Indonesia | – Laos |
| – India | – Libanon |
| – Birma (Myanmar) | – Liberia |
| – Pakistan | – Libya |
| – Srilanka | – Nepal |
| – Afganistan | – Filipina |
| – Kamboja | – Saudi Arabia |
| – Republik Rakyat Cina | – Sudan |
| – Mesir | – Syiria |
| – Ethiopia | – Thailand |
| – Ghana | – Turki |
| – Iran | – Vietnam Utara |

- Irak
- Jepang
- Yordania
- Vietnam Selatan
- Yaman

e) Hasil-hasil Konferensi Asia-Afrika

Konferensi Asia-Afrika menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.

- 1) Kerja sama di bidang ekonomi
- 2) Kerja sama di bidang kebudayaan
- 3) Masalah hak asasi manusia
- 4) Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka
- 5) Mengusahakan perdamaian dan kerja sama di dunia

Selain keputusan-keputusan di atas, KAA juga mengajak semua bangsa di dunia untuk hidup bersama dalam perdamaian dan menjalankan kerja sama dalam suasana persahabatan atas dasar sepuluh prinsip yang dikenal dengan “Dasasila Bandung” (*Bandung Declaration*).

f) Pengaruh KAA

Berkurangnya ketegangan dan bahaya pecahnya peperangan yang bersumber dari persengketaan masalah Taiwan antara RRC dengan Amerika Selatan. Perjuangan bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk mencapai kemerdekaan semakin meningkat. Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia, India, Birma, dan Srilanka mulai diikuti negara-negara lain yang tidak masuk Blok Barat maupun Blok Timur.

2. *Association of South East Asia Nations (ASEAN)*

a) Latar belakang terbentuknya ASEAN

Faktor intern, yaitu setelah berakhirnya Perang Dunia II lahirlah negara-negara baru di Asia Tenggara.

Faktor ekstern, yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara merasa khawatir oleh gerakan komunis yang berusaha menguasai seluruh Vietnam, Laos, dan Kamboja sebagai negara komunis.

b) Sejarah berdirinya ASEAN

Deklarasi ASEAN ditandatangani pada 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh utusan dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Kelima tokoh yang menandatangani Deklarasi ASEAN, yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), Narsisco Ramos (Filipina), dan Thanat Khoman (Thailand). Kelima negara di atas merupakan anggota ASEAN pada awal berdirinya. Sekarang ini, anggota ASEAN sudah bertambah 5 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

c) Tujuan ASEAN

- 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
- 2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional

- 3) Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling berkerjasama dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
 - 4) Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi
 - 5) Bekerja sama dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan, komunikasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat
- d) Peranan Indonesia dalam ASEAN
- 1) Indonesia termasuk salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN
 - 2) Indonesia membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indocina
 - 3) Indonesia adalah negara penyelenggara KTT pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali
 - 4) Indonesia ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekretariat Tetap ASEAN
3. *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*
- a) Proses terbentuknya PBB
- Terbentuknya PBB merupakan perjalanan panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dan kegiatan-kegiatan, antara lain Piagam Atlantik, Konferensi Washington, Konferensi Moscow, dan Konferensi San Fransisco.
- b) Tujuan PBB
- 1) Memelihara perdamaian dan keamanan dunia
 - 2) Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa
 - 3) Mengembangkan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan
 - 4) Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama
 - 5) Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB
- c) Peran Indonesia terhadap PBB
- 1) Secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama dalam Konferensi Asia-Afrika, ASEAN, maupun Gerakan Non Blok
 - 2) Secara langsung, Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia
 - 3) Pada 1985, Indonesia membantu PBB memberikan bantuan pangan ke Ethiopia ketika dilanda bahaya kelaparan
 - 4) Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

4. *Gerakan Non Blok (GNB)*

- a) Latar belakang berdirinya GNB
 - 1) Diilhami oleh KAA di Bandung, tahun 1955.
 - 2) Adanya krisis Kuba, yaitu Uni soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba.
 - 3) Ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur.
- b) Tujuan GNB
Gerakan Non Blok bertujuan untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara blok Barat dan blok Timur.
- c) Peranan Indonesia dalam GNB
 - 1) Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok dengan menandatangani Deklarasi Beograd.
 - 2) Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan KTT Gerakan Non Blok X yang berlangsung pada tanggal 1–6 September 1992 di Jakarta.

E. BAHASA NEGARA

a. Kata, Kalimat, dan Paragraf

1. *Morfem*

Morfem adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil.

a) Macam-macam morfem

1) Morfem bebas

Morfem bebas secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat.

Contoh: kursi (kata benda), pukul (kata kerja), baik (kata sifat)

2) Morfem terikat

Morfem terikat tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran.

Contoh: juang, temu ditambah imbuhan menjadi berjuang, bertemu

b) Pembentukan kata jadian (afiksasi)

Imbuhan (afiks) adalah bentuk terikat yang jika ditambahkan pada kata dasar akan mengubah makna gramatikal, seperti awalan (prefiks), sisipan (infiks), akhiran (sufiks), ataupun awalan-akhiran (konfiks). Perhatikan perubahan berikut ini!

Contoh kata	Makan	Makanan
Jenis kata	Kata Kerja	Kata Benda
Makna	Proses	Sesuatu yang di
Bentuk	Kata dasar	Kata jadian

Fungsi afiks menurut tempatnya sebagai berikut.

- 1) Prefiks ter- dan di- sebagai pembentuk kata kerja pasif dan kata sifat
 - Kata kerja pasif: terbaca, dibaca
 - Kata sifat (ter-): tertinggi, tercantik
- 2) Prefiks meng- dan ber- sebagai pembentuk kata kerja aktif
 - transitif (ada objek): menggambar, memukul, memasak
 - intransitif (tanpa objek): belajar, berbaring, menangis
- (3) Konfiks ke-an
 - Pembentuk kata benda: keadilan, kecerdasan, keberanian
 - Pembentuk kata sifat: ketinggian, kekecilan, kebesaran
 - Pembentuk kata kerja pasif: kedinginan, kepanasan

2. Frasa (kelompok kata)

a) Batasan frasa

Frasa adalah satuan gramatikal yang merupakan kesatuan linguistik dan tidak melebihi batas fungsi atau jabatan kalimat (S, P, O, Pel, dan K). Perhatikan kalimat "Kakak saya sedang menulis surat di kamar"!

Kakak saya : menduduki fungsi subjek = frasa

Kakak : menduduki fungsi subjek = bukan frasa karena terdiri atas satu kata

sedang menulis : menduduki fungsi predikat = frasa

menulis surat : melebihi batas fungsi = bukan frasa

surat : menduduki fungsi objek = bukan frasa karena terdiri atas satu kata

di kamar : menduduki fungsi keterangan = frasa

Sebuah frasa dapat diperluas menjadi lebih panjang menggunakan pernyataan "yang", namun harus tetap sesuai batas fungsi.

Contoh: Kakak saya yang cantik; Buku pelajaran yang baru

b) Pola pembentuk frasa

- 1) Kata benda + kata benda, misalnya rumah kayu, kapal layar
- 2) Kata benda + kata kerja, misalnya baju renang, kapal terbang
- 3) Kata benda + kata sifat, misalnya baju bersih, kitab suci
- 4) Kata kerja + kata benda, misalnya pulang kampung, mandi uang
- 5) Kata keterangan + kata sifat, misalnya sangat tinggi, amat kuat

c) Inti Frasa

Unsur inti frasa adalah unsur pokok, yakni unsur yang diterangkan (D), sedangkan unsur atribut, penjelas, atau pewatasnya adalah unsur yang menerangkan (M).

Contoh: Guru sekolah sedang mengajar

inti (D) atribut (M) atribut (M) inti (D)

3. *Klausa*

Klausa adalah satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Klausa berbeda dengan kalimat karena klausa tidak bertanda baca dan tidak memiliki intonasi akhir.

Klausa terdiri atas klausa utama (induk kalimat) dan klausa bawahan (anak kalimat). Klausa utama adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Klausa ini memiliki ciri utama, yakni tidak didahului oleh kata hubung (konjungsi). Perhatikan kalimat berikut!

Ayah membaca koran, sedangkan ibu memasak di dapur.

(induk kalimat) (anak kalimat)

4. *Kalimat*

a) Fungsi sintaksis

Kata-kata dalam kalimat akan menduduki fungsi sintaksis tertentu, yakni S, P, O, Pel, dan K.

- 1) Predikat (P): unsur pokok kalimat.
- 2) Subjek (S): unsur pokok kedua setelah predikat.
- 3) Objek (O): hanya terdapat pada kalimat berpredikat verba transitif, dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif.
- 4) Pelengkap (Pel): terdapat setelah predikat verba, tidak dapat menjadi subjek.
- 5) Keterangan (K): dapat terletak sebelum dan setelah predikat.

b) Jenis-Jenis Kalimat

1) Kalimat dasar

Kalimat dasar atau kalimat utama hanya terdiri atas unsur wajib S-P. Berikut ini adalah pola-pola kalimat utama dalam bahasa Indonesia.

- Subjek-Predikat (S-P)
Contoh: Adik rajin.
- Subjek-Predikat-Objek (S-P-O)
Contoh: Adik membeli sepatu.
- Subjek-Predikat-Keterangan (S-P-K)
Contoh: Adik tidur di kamar.
- Subjek-Predikat-Pelengkap (S-P-Pel)
Contoh: Sepatu berwarna putih.
- Subjek-Predikat-Objek-Pelengkap (S-P-O-Pel)
Contoh: Ibu menjahit seragam olahraga.
- Subjek-Predikat-Objek-Keterangan (S-P-O-K)
Contoh: Petani memikul gabah di bahunya.
- Keterangan-Subjek-Predikat (K-S-P)
Contoh: Kemarin Adi kecelakaan.

2) Kalimat tunggal

Kalimat tunggal terdiri atas satu klausa. Selain unsur wajib (S-P) kalimat tunggal juga dapat ditambahkan berbagai jenis keterangan (K).

Contoh: Kakak membaca buku pelajaran

Kakak membaca buku pelajaran di kamar semalam

3) Kalimat majemuk

Kalimat majemuk terdiri atas dua klausa atau lebih.

- Kalimat majemuk setara: kedudukan antarklausanya setara, terdapat konjungtor bahwa, atau ditandai dengan konjungtor berikut:
- Setara hubungan penjumlahan: dan, serta, lalu, kemudian, baik... maupun...
- Setara hubungan pemilihan: atau
- Setara hubungan pertentangan: tetapi, namun, sedangkan, bukan... melainkan...
- Kalimat majemuk bertingkat: kedudukan antarklausanya tidak sederajat, yakni terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat.

4) Kalimat inti

Kalimat inti adalah kalimat yang terdiri atas inti S-P atau inti S-P-O untuk kalimat transitif. Kalimat inti dapat mengalami perubahan menjadi kalimat transformasi.

Ciri-Ciri	Kalimat inti	Kalimat Transformasi
Struktur kalimat	Inti S-P atau S-P-O	Terjadi penambahan/perubahan fungsi kalimat
Intonasi	Tidak berintonasi	Terjadi perubahan intonasi
Susunan kalimat	Normal	Dapat diinversi
Bentuk kalimat	Positif	Dapat terjadi penegasan

5) Kalimat efektif

Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan dan perasaan dengan tepat ditinjau dari segi struktur, diksi, dan logikanya. Ketidakefektifan suatu kalimat dapat terjadi karena hal-hal berikut, seperti pleonasmе, ambiguitas, tidak jelas unsur subjek, kemubaziran preposisi, kesalahan logika, ketidaktepatan bentuk kata, dan sebagainya.

5. *Kata dan Istilah*

Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah yang digunakan dalam suatu kalimat dapat dipahami jika arti dan penggunaannya diketahui. Istilah terbagi atas kelompok berikut.

a) Istilah Umum

Istilah umum adalah istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum.

Contoh: Pihak sekolah akan mengadakan wisata budaya selama libur semester (wisata budaya = perjalanan wisata ke pusat budaya)

b) Istilah Khusus

Istilah khusus adalah istilah yang pemakaiannya dan/atau maknanya terbatas pada bidang-bidang tertentu, seperti sains, pertanian, ekonomi, agama, seni, dan sebagainya.

Contoh: Adik sekolah di institut seni untuk menjadi seorang pianis (pianis = seorang pemain alat musik piano)

6. *Paragraf*

a) Pola pengembangan paragraf

1) Pola alamiah

Suatu paragraf dapat dikembangkan dengan pola sesuai urutan waktu (kronologis) atau urutan ruang (spasial).

2) Pola logis

Pola pengembangan paragraf secara logis didasarkan pada jalan pikiran, seperti pola berikut.

- Umum-khusus (deduktif)
- Khusus-umum (induktif)
- Sebab-akibat
- Klimaks-antiklimaks
- Perbandingan-pertentangan
- Pengembangan contoh

b) Syarat pembentukan paragraf

1) Prinsip kesatuan (unity)

Sesuai prinsip ini, setiap paragraf seharusnya memiliki satu gagasan pokok. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah hal yang dibahas atau diungkapkan dalam suatu teks. Gagasan pokok tersebut umumnya selalu berada dalam kalimat utama.

2) Prinsip kepaduan (kohesif dan koheren)

Paragraf yang baik seharusnya merupakan kumpulan kalimat yang saling berhubungan (koheren) dan padu (kohesif), tidak terlepas satu sama lain.

3) Prinsip kelengkapan

Paragraf disebut lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat utama.

b. Pemahaman Wacana

1. *Jenis-jenis wacana*

a) Wacana argumentasi dan persuasi

Karangan argumentasi bertujuan untuk memengaruhi pembaca dengan cara mengajukan bukti-bukti mengenai objek yang diargumentasikan. Wacana persuasi juga bertujuan untuk memengaruhi pembaca, namun persuasi lebih mengutamakan untuk menggunakan aspek-aspek psikologis dalam memengaruhi pembaca. Contoh wacana persuasi yang paling banyak ditemui adalah karangan iklan yang ada di berbagai media.

b) Wacana deskripsi

Wacana deskripsi merupakan bentuk wacana yang berusaha menyajikan objek atau suatu hal sedemikian rupa sehingga objek yang dibicarakan sepertinya dapat dilihat atau dibayangkan oleh pembaca.

c) Wacana narasi

Wacana narasi berisi cerita yang umumnya terdiri atas unsur waktu, pelaku, dan peristiwa. Melalui wacana jenis ini, pembaca dapat membentuk imajinasinya.

d) Wacana eksposisi

Wacana eksposisi berisi uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian mengenai suatu hal, umumnya dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat.

2. *Kepaduan wacana*

a) Upaya gramatikal

(1) Konjungsi: menghubungkan paragraf dengan paragraf

(2) Kata ganti: mengurangi bagian kalimat yang sama sehingga kalimat-kalimat terlihat saling berhubungan

(3) Ellipsis: menghilangkan bagian kalimat yang sama yang terdapat di dalam kalimat yang lain sehingga keseluruhan wacana menjadi lebih efektif

b) Upaya Semantik

Semantik merupakan ilmu tentang makna kata dan kalimat. Upaya semantik dapat menggunakan teknik berikut.

(1) Menggunakan hubungan pertentangan pada kedua bagian kalimat yang terdapat dalam wacana.

Contoh: Saya datang, Anda pergi. Saya hadir, Anda absen. Maka, mana mungkin kita bisa berbicara.

(2) Menggunakan hubungan generik-spesifik atau sebaliknya spesifik-generik.

Contoh: Pemerintah berusaha menggunakan kendaraan umum sebanyak-banyaknya dan akan berupaya mengurangi mobil-mobil pribadi.

3. *Analisis wacana*

Umumnya, setiap wacana bersifat koheren, artinya terdapat kepaduan gagasan antara bagian-bagian wacana tersebut. Analisis wacana dapat mudah dilakukan jika setiap gagasan yang terdapat dalam wacana tersebut dipahami dengan tepat.

c. Menulis Terbatas

1. *Pengertian menulis terbatas*

Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide/gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampai (Tarigan, 1986:15). Tes menulis terbatas menguji penalaran seseorang dalam memahami bentuk kata atau kalimat yang tepat sesuai dengan isi dan kepaduan suatu jenis teks.

2. *Jenis-jenis teks dalam menulis terbatas*

a) Teks nonsastra

Teks nonsastra adalah karangan ilmiah yang bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Beberapa jenis teks nonsastra, antara lain: berita, editorial, teks eksposisi, deskripsi, argumentasi, narasi, resensi, biografi, dan teks prosedur.

b) Teks sastra

Teks sastra adalah tulisan yang berisi cerita rekaan dengan bahasa, gaya, dan citra yang indah. Beberapa jenis teks sastra, antara lain: puisi, prosa, pantun, dan teks drama.

3. *Bagian-bagian menulis terbatas*

a) Melengkapi unsur teks nonsastra

Bagian yang rumpang dari keseluruhan teks nonsastra dapat dilengkapi dengan kata atau kalimat yang tepat dengan cara mempertimbangkan informasi utuh dari teks tersebut. Setiap kata atau kalimat yang ada harus memenuhi syarat-syarat paragraf yang padu.

b) Melengkapi unsur teks sastra

Cerpen atau novel merupakan salah satu jenis teks sastra berbentuk prosa. Untuk melengkapi penggalan cerpen atau novel yang rumpang diperlukan kalimat yang berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Caranya dengan menemukan kata kunci yang bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan maksud cerita.

c) Menghubungkan beberapa kalimat dengan konjungsi yang sesuai

Konjungsi merupakan kata yang menghubungkan kata/frasa/kalimat. Konjungsi yang umumnya digunakan sebagai berikut.

1) Konjungsi antarklausa

- Konjungsi koordinatif

Contoh: dan, serta, tetapi, sedangkan, melainkan, atau.

- Konjungsi korelatif
Contoh: baik ... maupun ...; tidak ... tetapi ...; bukan ... melainkan ...; entah ... entah ...; jangankan ... pun ...
 - Konjungsi subordinatif
Subordinatif atributif, misalnya: yang
Subordinatif komplementatif, misalnya: bahwa
Subordinatif waktu, misalnya: ketika, sejak, sambil, selagi, sesudah, sebelum
Subordinatif syarat, misalnya: jika, kalau, jikalau, asal, bila, manakala
Subordinatif tujuan, misalnya: agar, supaya
Subordinatif pengandaian, misalnya: andaikata, seandainya
Subordinatif konsesif, misalnya: biarpun, walaupun, meskipun
Subordinatif perbandingan, misalnya: seperti, seolah, seakan-akan
Subordinatif hasil/akibat, misalnya: sehingga, sampai, maka
Subordinatif perbandingan, misalnya: sama dengan, lebih daripada
- 2) Konjungsi antarkalimat
Contoh: Oleh karena itu; Walaupun demikian; Akan tetapi; Selain itu; Lagi pula.

